

Nurul Salsabila

(1) PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALOPO DENGAN MENGGUNAKAN KONSE...

 Akuntansi

 Fak. Ekonomi dan Bisnis

 LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3119800566

Submission Date

Dec 20, 2024, 10:18 AM GMT+7

Download Date

Dec 20, 2024, 10:23 AM GMT+7

File Name

jurnal_turniting_nursal_-_Irma.docx

File Size

115.8 KB

17 Pages

4,531 Words

30,745 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 4%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

-  **Hidden Text**
330 suspect characters on 3 pages
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 9% Internet sources
- 4% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
pt.scribd.com		2%
2	Internet	
www.kajianpustaka.com		2%
3	Internet	
www.scribd.com		1%
4	Internet	
www.researchgate.net		1%
5	Internet	
fe.ubhara.ac.id		1%
6	Internet	
jurnal.unidha.ac.id		0%
7	Internet	
digilibadmin.unismuh.ac.id		0%
8	Internet	
repo.stie-pembangunan.ac.id		0%
9	Internet	
repository.unpas.ac.id		0%
10	Publication	
Yeremia Gosal, Herman Karamoy, Jessy Warongan. "ANALISIS PERHITUNGAN DA...		0%
11	Internet	
ojs.unik-kediri.ac.id		0%

12 Internet

ejurnal.stie-trianandra.ac.id 0%

13 Internet

digilib.stimaimmi.ac.id 0%

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALOPO DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Nurul Salsabila¹, Indah Pratiwi², Rifqa Ayu Dasila³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

*penulis korespondensi email : ssalsabilanurul04@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif, efisiensi, dan ekonomis. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja tersebut adalah konsep *value for money* yang menitikberatkan pada tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo selama periode 2019-2023 dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis statistika deskriptif, menggunakan data APBD dan Realisasi APBD dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, yang kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran memenuhi prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan efisiensi Pemerintah Kota Palopo secara umum berada pada kategori cukup baik, walaupun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas cenderung menurun dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pendapatan.

Kata kunci: Kinerja keuangan, *Value for Money*, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

ABSTRACT

Regional government financial management has an important role in improving public services and supporting development. Good financial performance reflects effective, efficient and economical use of the budget. One method that can be used to measure performance is the value for money concept which focuses on three main aspects: economy, efficiency and effectiveness. This research aims to measure the financial performance of the Palopo City Government during the 2019-2023 period using the Value for Money concept. The method used is a quantitative descriptive approach with descriptive statistical analysis, using APBD data and APBD Realization from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) OF Palopo City. Data is collected through official documents published by local governments, which are then analyzed to assess the extent to which budget use meets the principle of economics, efficiency and effectiveness. The research results show that the economic performance and efficiency of the Palopo City Government is generally in the quite good category, although there are fluctuations from year to year. The effectiveness ratio tends to decrease from year to year, indicating a gap between planning and actual income.

Keywords: Financial performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan elemen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja keuangan yang baik akan menjamin alokasi anggaran daerah digunakan secara optimal, tanpa pemborosan sumber daya

atau penyalahgunaan anggaran. Kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesuksesan wilayah otonom dalam pelaksanaan kemandirian daerah sehingga performa keuangannya dapat menentukan tanggung jawab penguasa, dalam setiap rupiah uang rakyat wajib dilaporkan secara akuntabel (*accountability*) kepada masyarakat yang menyumbangkan dana mereka untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah. (Amril, 2023)

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.

Namun, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang masih kesulitan dalam memastikan pengelolaan keuangannya memenuhi standar tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah sering kali mengungkapkan adanya inefisiensi dan ketidakakuratan dalam pengalokasian anggaran, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengukur kinerja keuangan yang dapat membantu mengevaluasi seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

Metode efektif yang bisa dipertimbangkan adalah pendekatan *value for money*. *Value for money* memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi publik dengan menjamin kualitas layanan yang disediakan sesuai dengan tujuannya, mengupgrade kualitas layanan, mengefisienkan pemborosan dan menghemat beban. Selain itu, pendekatan ini juga memastikan distribusi anggaran lebih fokus untuk prioritas umum dan memperluas wawasan masyarakat terhadap pengeluaran negara sebagai dasar tanggung jawab publik (Taufik, 2023).

Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan konsep *value for money* dapat memberikan gambaran umum mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, penelitian (Wahyuni1, n.d.) mengukur kinerja realisasi APBD Kota Padang 2016-2020 dan menunjukkan bahwa Kota Padang telah mencapai efektivitas dalam mencapai program-program pembanguana. Namun, hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan kendala dalam efisiensi dan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang optimal. Selain itu penelitian oleh (Khoiriawati et al., 2022) , yang menganalisis pengelolaan keuangan desa melalui konsep *value for money* menunjukkan bahwa desa-desa yang diteliti telah mencapai efisiensi yang baik, namun aspek ekonomi masih memerlukan perbaikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kajian tentang kinerja anggarab pemerintah daerah dengan fokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Melalui penerapan gagasan *value for money*, penelitian ini akan mengukur sebanyak 3 aspek , seperti ekonomi, efesiensi, beserta efektivitas, dalam pengelolaan anggaran daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memeberikan wawasan yang lebih spesefik tentang peran BPKAD dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan menawarkan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Pengukuran Kinerja

Menurut (Dara Nadeya Dinanty et al., 2023) , Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menilai berbagai aktivitas yang terdapat dalam rantai nilai perusahaan. Hasilnya penaksiran ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai masukan unuk menyampaikan informasi pencapaian dalam implementasi perencanaan kinerja dimana organisasi harus mengatur kegiatan perencanaan dan pengendalian.

sedangkan menurut (Sulisworo, 2020), penilain kinerja dipahami sebagai proses pemantauan dan pelaporan suatu rencana kerja berkelanjutan yang perlu diselesaikan untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. Didefinisikan penilaian kinerja yang dilakukan dapat difokuskan pada jenis atau tingkatan level kegiatan yang dilaksanakan, barang atau layanan yang dihasilkan secara langsung (*otput*) dan hasil atau efek dari produk maupun jasa itu tersebut (*autcome*). Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan, proyek, peran, atau aturan yang tujuan dan sarannya sudah diidentifikasi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan sebuah analisa untuk melihat pada titik mana suatu perusahaan telah melaksanakan seluruh peraturan yang sudah ditentukan dengan jelas dan juga sesuai dengan jumlahnya (Handy Eko Saputra, Goso, 2023). Laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi paling penting bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menfsirkan keputusan finansial. Apabila informasi dalam kespakatan pinjamam tersebut dapat dimanfaatkan untuk meramalkan apa yang akan terjadi dimasah depan, hal itu membuat kesepakatan pinjaman menjadi lebih menguntungkan (Rezkia et al., 2023). Kinerja keuanga pemerintah daerah adalah tingkatan perolehan hasil kerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup realisasi anggaran serta anggaran melalui pemanfaatan indikator keuangan yang diatur oleh kebijakan atau peraturan regulasi yang berlaku sepanjang periode anggran (Vinsensius Agus Rakadewa, 2020).

5 Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 menekankan pentingnya reformasi dalam lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan bagi berbagai reformasi kelembagaan yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (2) mewajibkan perangkat daerah untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran sebagai sarana evaluasi atas hasil yang dicapai. Begitu pula, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tentang kriteria prestasi kepala daerah mengatur bahwa kepala daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut mencakup kewajiban penyampaian laporan perhitungan dan norma perhitungan APBD, laporan arus kas, serta neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja (Maryanti & Munandar, 2021).

3 Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan pertanggungjawabannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, berbagai prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan ditegaskan kembali dan dijadikan sebagai pedoman (Maryanti & Munandar, 2021).

Value For Money

Value for money adalah sebuah pendekatan evaluasi performa, terutama pada organisasi sektor publik yang dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program dengan merujuk pada tiga unsur penting yang bernilai yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui pendekatan *value for money* akan diperoleh berbagai data berupa indikator mengenai pembiayaan atau dana yang dikeluarkan untuk memberikan nilai tertentu bagi masyarakat (Rizeki, 2023).

Ekonomi

12 Ekonomi merupakan pembelian sumber daya (*input*) khusus dengan harga paling rendah. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan nilai *output* yang digunakan dalam bentuk nilai uang. Ekonomi mengacu pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi sumber daya *input* sambil mencegah pengeluaran yang tidak perlu dan tidak memberikan hasil (mekari jurnal, 22 C.E.). Ekonomi terkait dengan perolehan *input* dengan standar kualitas tertentu dan harga paling rendah, ukuran ekonomi dari rasio antar *input actual versus* yang telah direncanakan. Kemajuan pemerintah daerah akan dilaporkan ekonomi jika rasionya kurang dari 1 atau kurang dari 100%, maka semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerjanya akan lebih baik (Khikmah, 2015).

6

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

Ketentuan:

Jika $< 100\%$ berarti ekonomis

Jika $> 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $= 100\%$ berarti ekonomis berimbang

Sumber: (Wahyuni1, n.d.)

Efisiensi

Efisiensi adalah aspek krusial dalam ketiga tema *Value For Money* (VFM). Dibandingkan dengan ekonomi dan efektivitas, efisiensi merupakan elemen indikator VFM yang dapat diukur melalui rasio antara *output* dan *input*. Ilmu ekonomi lebih fokus pada *input*, sedangkan efisiensi hanya membahas tentang *output*. Dalam pengukuran kinerja berdasarkan *value for money*, efisiensi dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- Efisiensi alokatif

Efisiensi alokatif mengacu pada kapasitas untuk menggunakan sumber daya *input* pada level kapasitas optimal.

- Efisiensi teknis atau manajerial

Efisiensi teknis atau manajerial berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya *output* pada tingkat *input* (mekari jurnal, 22 C.E.).

Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah akan efektif apabila rasionya kurang dari 1 atau dibawah dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik rasio kinerjanya (Khikmah, 2015).

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Ketentuan:

Jika $< 100\%$ berarti efisien

Jika $> 100\%$ berarti tidak efisien

4

4 Jika = 100% berarti efisien berimbang

Sumber: (Wahyuni1, n.d.)

Efektivitas

2 Efektivitas merupakan tingkat pencapaian atau kegagalan organisasi dalam meraih tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut akan dikatakan berfungsi secara efektif. Aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu efisiensi menentukan seberapa banyak pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya mengukur apakah suatu program atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (mekari jumat, 22 C.E.). Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditentukan berdasarkan potensi nyata daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang diperoleh sama dengan 1 atau 100%, namun semakin tinggi rasio efektivitas akan semakin baik (Khikmah, 2015).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Keterangan:

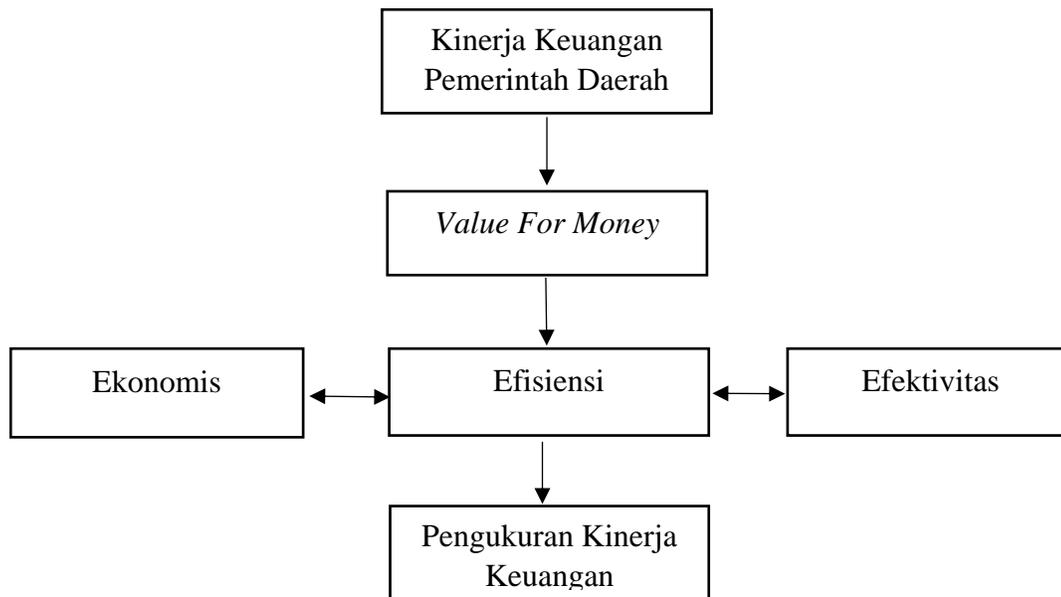
4 Jika > 100% berarti efektif

jika < 100% berarti tidak efektif

jika = 100% berarti efektif berimbang

Sumber: (Wahyuni1, n.d.)

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, yang berlokasi di jalan Andi Djemma No. 31, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dengan menggunakan pendekatan konsep *value for money* untuk periode tahun 2019 hingga 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang diperoleh dari laporan keuangan BPKAD Kota Palopo, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD. Sumber data ini adalah data sekunder yang didapatkan dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh BPKAD dan pemerintah daerah serta situs web resmi kementerian keuangan.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses dokumen resmi yang dipublikasikan oleh BPKAD dan pemerintah daerah yang dapat diakses melalui situs web <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Data yang diperoleh

akan diorganisir dan dianalisis untuk mengidentifikasi kinerja keuangan berdasarkan konsep *value for money*, Langkah-langkahnya meliputi:

- Mengumpulkan data laporan tahunan dari situs resmi BPKAD.
- Mengumpulkan data APBD dan RAPBD dari tahun 2019-2023.
- Memverifikasi keakuratan data yang diperoleh.

Metode Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif untuk menggambarkan status kinerja keuangan BPKAD. Statistika deskriptif merupakan ilmu yang mempelajari cara memperoleh, mengolah dan menyajikan data penelitian (Wilman Juniardi & Pamela Natasa, 2022). Indikator yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

- Ekonomi: Bagaimana pengeluaran dilakukan sesuai anggaran yang direncanakan.
- Efisiensi: Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dan diperoleh.
- Efektivitas: Tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam APBD.

HASIL DAN PEMBAHASA

Data Keuangan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Koota Palopo didasarkan pada data keuangan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo tahun 2019-2023
(dalam Milyaran rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	1.008,65	1.006,01	982,41	968,65	994,84
PAD	167,05	189,59	167,92	151,14	239,58
Pajak Daerah	31,68	35,65	39,28	39,78	43,57
Retribusi Daerah	13,76	10,44	10,76	12,34	11,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,00	7,50	7,00	7,11	7,00
Lain-Lain PAD yang Sah	114,62	136,00	110,88	91,90	177,26
TKDD	764,38	742,62	737,56	741,99	655,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764,38	742,62	737,56	741,99	655,46

Pendapatan Transfer Antar Daerah	57,43	54,62	56,14	75,52	67,41
Pendapatan Lainnya	77,22	73,80	76,93	0	99,79
Pendapatan Hibah	19,78	19,18	0	0	
Dana Darurat	0	0	0	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	20,79	18,88	32,38
Belanja Daerah	1.011,20	1.106,45	986,61	992,93	1.066,89
Belanja Pegawai	470,39	480,87	462,39	992,93	466,41
Belanja Pegawai	470,39	480,87	462,39	454,85	466,41
Belanja Barang Jasa	302,96	273,47	275,09	454,85	299,65
Belanja Barang dan Jasa	302,96	273,47	275,09	274,47	299,65
Belanja Modal	220,61	333,44	229,63	274,47	280,96
Belanja Modal	220,61	333,44	229,63	242,97	280,96
Belanja Lainnya	17,25	18,66	19,48	242,97	19,87
Belanja Bantuan Keuangan	0,84	0,85	0	20,65	0
Belanja Bunga	3,36	5,46	2,36	1,88	2,04
Belanja Hibah	10,55	10,85	10,71	13,93	10,64
Belanja Bantuan Sosial	0,50	0,50	1,91	0,11	0,19
Belanja Tidak Terduga	2,00	1,00	4,50	4,73	7,00
Pembiayaan Daerah	2,56	100,44	4,20	24,28	72,06
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5,50	103,38	30,94	37,22	75,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,50	0	7,14	27,22	75,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	103,38	23,80	10,00	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,94	2,94	26,74	12,94	2,94
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,94	2,94	26,74	12,94	2,94

Sumber: Dispenda Kota Palopo 2019-2023. Diolah

Table 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun 2019-2023
(dalam Milyaran upiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	984,50	969,41	936,59	988,20	943,09
PAD	165,66	177,21	140,13	178,68	194,01

Pajak Daerah	34,86	34,03	35,62	41,42	46,69
Retribusi Daerah	9,07	8,88	11,59	18,04	10,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,50	6,80	7,80	7,04	7,35
Lain-Lain PAD yang Sah	114,23	127,49	85,12	112,18	129,42
TKDD	739,85	672,57	722,95	737,67	664,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739,85	672,57	722,95	737,67	664,16
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50,16	46,44	47,98	62,00	72,63
Pendapatan Lainnya	78,99	119,64	73,51	71,85	84,91
Pendapatan Hibah	28,83	73,19	5,20	0,39	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			20,32	9,46	12,28
Belanja Daerah	956,45	943,89	935,48	1.015,34	927,79
Belanja Pegawai	454,39	461,60	450,04	441,77	428,70
Belanja Barang dan Jasa	278,83	248,52	268,50	291,29	303,59
Belanja Modal	198,61	207,97	206,73	264,92	182,56
Belanja Lainnya	24,63	25,80	10,20	17,36	12,94
Belanja Bantuan Keuangan	0		1,61	0	
Belanja Bunga	2,18	2,05	0	1,34	1,10
Belanja Hibah	18,78	11,58	6,39	15,84	11,74
Belanja Bantuan Sosial	3,67	3,32	2,21	0,17	0,11
Belanja Tidak Terduga	0	8,84	0	0,01	0
Pembiayaan Daerah	6,00	21,31	43,89	42,05	11,97
Penerimaan Pembiayaan Daerah	51,52	70,65	48,53	44,99	14,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,14	34,05	46,83	44,99	14,91
Penerimaan Pinjaman Daerah	46,38	36,60	1,70	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45,52	49,34	4,64	2,94	2,94
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45,52	49,34	4,64	2,94	2,94

1. Rasio Ekonomis

Ekonomi merupakan praktik membeli produk dan layanan berdasarkan standar kualitas tertentu dengan harga terbaik. Jika menyangkut lembaga pemerintah, skala ekonomi ditunjukkan oleh seberapa banyak uang yang disisihkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pengukuran tingkat perekonomian memerlukan informasi yang dimulai dari informasi perhitungan belanja dan realisasinya (Nugraheni, 2023). Terciptanya otonomi daerah mengharuskan Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangan wilayah otonominya sebisa mungkin untuk mencakup biaya daerah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Amril, 2023). Pengukuran tingkat ekonomis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo dapat diamati pada tabel 3.

tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis
2019	1.011,200,000,000	956,450,000,000	94.59%
2020	1.106,450,000,000	943,890,000,000	85.31%
2021	986,610,000,000	935,480,000,000	94.82%
2022	992,930,000,000	1.015,340,000,000	102.26%
2023	1.066,890,000,000	927,790,000,000	86.96%

Table 3. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Ekonomis Pemerintah daerah Kota palopo Tahun 2019-2023

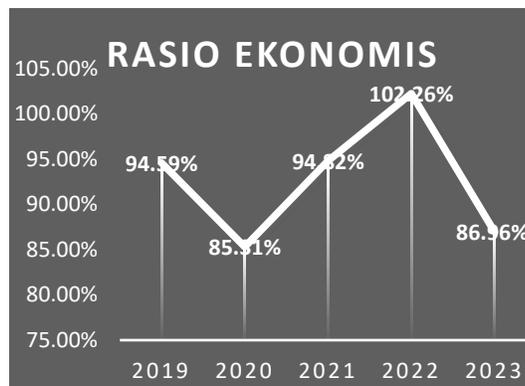
Rasio ekonomis menggambarkan efisiensi biaya dalam pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dari tabel hasil perhitungan rasio ekonomis, terlihat bahwa laporan perokonomian pemerintah Kota Palopo mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Laporan di bawah 100% Pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 menunjukkan kinerja perokonomian yang cukup baik, dimana realisasi pengeluaran lebih rendah dari anggaran. Namun, pada tahun 2022, rasio ekonomi melebihi 100% atau 102,26%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran melebihi anggaran yang direncanakan menandakan kurangnya pengendalian terhadap pengeluaran.

Pembelajaan yang melebihi anggaran ini dapat dikaitkan dengan peningkatan signifikan pada belanja modal untuk proyek-proyek tertentu yang memerlukan biaya tambahan. Belanja tak terduga, seperti penanganan proyek prioritas, menjadi salah satu penyebab utama ketidakekonomisan. Selain itu, peningkatan belanja modal juga dapat terjadi akibat kurangnya akurasi dalam perencanaan awal anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan yang lebih baik terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Secara umum, pemerintah Kota Palopo menunjukkan upaya untuk mempertahankan kinerja ekonomis dengan rasio pengeluaran di bawah anggaran pada sebesar tahun penelitian. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan pengendalian pengeluaran yang cukup baik. Peningkatan rasio pada tahun 2022 merupakan pengecualian yang dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Ini sejalan dengan teori pengukuran kinerja yang menyebutkan bahwa ketidakekonomisan sering kali disebabkan oleh

pemborosan sumber daya atau kebutuhan belanja tak terduga yang melebihi anggaran awal. Kinerja ekonomi yang baik (rasio di bawah 100%) menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran secara hemat. Namun, rasio di atas 100% pada 2022 mengindikasikan perlu diperketatnya kontrol anggaran dan perencanaan agar pengeluaran tidak melampaui batas yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Wahyuni I, n.d.), yang menganalisis kinerja ekonomi Kota Padang, ditemukan bahwa Kota Padang mengalami ketidakekonomisan pada beberapa tahun akibat pengeluaran modal yang meningkat. Hal ini mirip dengan temuan di Kota Palopo pada tahun 2022. Namun, Kota Palopo secara keseluruhan memiliki rasio yang lebih stabil dibandingkan kota padang. Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan akurasi dalam penyusunan anggaran dan memperketat kontrol atas belanja modal untuk menghindari ketidakekonomisan di masa mendatang.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019-2023

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (biaya produksi). Proses operasional dapat dianggap efektif jika suatu produk atau hasil pekerjaan tertentu dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan dana seminimal mungkin (*spending well*) (Sanger et al., 2023). Pengukuran tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dapat diamati pada tabel 4.

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2019	956,450,000,000	984,500,000,000	97,15%
2020	943,890,000,000	969,410,000,000	97,37%
2021	935,480,000,000	936,590,000,000	99,88%
2022	1.015,340,000,000	988,200,000,000	102,75%
2023	927,790,000,000	943,090,000,000	98,38%

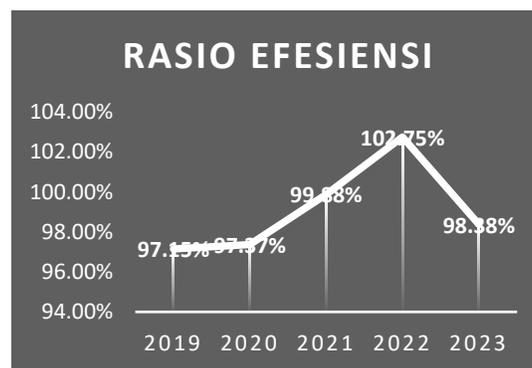
Table 4. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Efisiensi Pemerintah daerah Kota palopo Tahun 2019-2023

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi saat ini dengan pendapatan daerah. Teori pengukuran kinerja menjelaskan bahwa efisiensi mengukur hubungan antara input (sumber daya) dan *output* (hasil yang dicapai).

Dalam konteks rasio efisiensi, teori ini mengharuskan pemerintah menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum, kinerja Pemerintah Kota Palopo dapat dikatakan efisien, karena sebagian besar rasio efisiensi berada di bawah 100% seperti tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 kinerja pemerintah Kota Palopo konsisten dengan teori tersebut, yang berarti pengeluaran pemerintah lebih rendah dibandingkan pendapatan yang terealisasi. Artinya pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022, rasio efisiensi mencapai 102,75%, menunjukkan bahwa pengeluaran melebihi pendapatan. Kenaikan rasio efisiensi pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh peningkatan pengeluaran operasional yang signifikan, termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal ini mungkin diperlukan untuk menangani proyek-proyek prioritas atau kebutuhan mendesak yang tidak sepenuhnya tercakup dalam perencanaan awal.

Meski terdapat inefisiensi pada tahun 2022, namun secara umum Pemerintah Kota Palopo cukup efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio di bawah 100% pada tahun-tahun lainnya menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dengan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa ketidakefisienan sering kali terjadi ketika alokasi sumber daya tidak optimal atau terdapat pengeluaran yang mendesak yang melampaui kapasitas pendapatan. Kenaikan rasio efisiensi di atas 100% menjadi perhatian terkait keseimbangan fiskal, agar daerah tetap stabil dan terhindar dari defisit berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Sanger et al., 2023) di Kota Manado, ditemukan bahwa efisiensi pada Kota Manado juga mengalami fluktuasi serupa, terutama saat terjadi lonjakan belanja modal yang tidak direncanakan, namun Kota Palopo menunjukkan rasio yang lebih baik dibandingkan Kota Manado pada periode yang sama. Untuk mempertahankan efisiensi, Pemerintah Kota Palopo dapat memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam alokasi dana.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019-2023

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah sejauh mana hasil program memenuhi harapan. Efektivitas pemerintah daerah diukur dari kualitasnya mampu memperoleh penghasilan awal yang diinginkan dari daerah relative terhadap tujuan yang ditentukan sesuai dengan potensi aktual daerah. Jika perbandingannya 1 atau 100% maka dianggap efektif namun, semakin tinggi rasionya semakin bagus (A.M. Furqon, Iskandar Sam, 2023). Pengukuran tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dapat diamati pada tabel 5.

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas
2019	1.008,650,000,000	984,500,000,000	97.61%
2020	1.006,010,000,000	969,410,000,000	96.36%
2021	982,410,000,000	936,590,000,000	95.34%
2022	968,650,000,000	988,200,000,000	102.02%
2023	994,840,000,000	943,090,000,000	94.80%

Table 5. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Pemerintah daerah Kota palopo Tahun 2019-2023

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas mencapai 102,2%, yang menunjukkan realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang direncanakan. Ini mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah, termasuk Pajak Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Namun, pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 menunjukkan kinerja pemerintah Kota Palopo pada tahun-tahun tersebut dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah lebih rendah dari target yang direncanakan dalam APBD. Sebagai contoh, pada tahun 2021, pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 982,41 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp 936,59 miliar.

Kinerja yang kurang efektif pada tahun-tahun tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya optimalisasi pemungutan pajak daerah, kendala dalam pengumpulan PAD, atau target pendapatan yang terlalu tinggi dibandingkan potensi riil daerah. Sebaliknya, pencapaian efektivitas yang baik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baru atau meningkatkan remintansi dari pajak dan retribusi.

Teori pengukuran kinerja menyatakan bahwa efektivitas mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dalam konteks rasio efektivitas, teori ini menyatakan bahwa realisasi pendapatan memenuhi atau melampaui target mencerminkan kinerja yang efektif. Pada tahun 2022, kinerja Pemerintah Kota Palopo selaras dengan teori tersebut dan menunjukkan keberhasilan strategi pengumpulan pendapatan. Namun rendahnya rasio efektivitas pada tahun-tahun lainnya menunjukkan bahwa perencanaan pendaptan belum sepenuhnya sesuai dengan potensi riil daerah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa efesiensi yang rendah dapat muncul karena target yang tidak realistis, penurunan aktivitas ekonomi, atau pengelolaan sumber daya yang kurang optimal. Untuk meningkatkan kinerja efektivitas

Pemerintah Kota Palopo harus meningkatkan akurasi dalam perencanaan target dan optimalisasi pemungutan pajak daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian oleh (Taufik, 2023) di Kota Surabaya, ditemukan bahwa Kota Surabaya berhasil mencapai efektivitas yang lebih tinggi pada beberapa tahun akibat optimalisasi penerimaan PAD dan strategi pajak yang lebih agresif. Kota Palopo memiliki pola yang serupa, terutama pada tahun 2022, tetapi memerlukan upaya lebih untuk meningkatkan efektivitas pada tahun lainnya. Untuk meningkatkan kinerja efektivitas, Pemerintah Kota Palopo perlu memperbaiki perencanaan target dengan melakukan kajian potensi pendapatan secara lebih mendalam dan memperkuat sistem pemungutan pajak. Optimalisasi teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palopo 2019-2023

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo periode 2019 sampai dengan 2023 dengan menggunakan konsep *Value for Money*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Ekonomis: kinerja ekonomi Kota Palopo dinilai cukup baik dengan laporan di bawa 100% pada sebagian besar tahun penelitian, yang berarti pengeluaran yang dikeluarkan lebih rendah dari perkiraan. Namun pada tahun 2022, rasio ekonomi melebihi 100% yang menunjukkan ketidak efisienan dalam pengeluaran.
2. Rasio Efisiensi: kinerja efisiensi berada di bawah 100% pada sebagian besar tahun, yang menunjukkan bahwa pengeluaran lebih rendah dibandingkan pendapatan. Namun pada tahun 2022 efisiensinya menurun dengan rasio lebih dari 100% yang menunjukkan pengeluaran melebihi pemasukan yang diterima.
3. Rasio Efektivitas: rasio efektivitas menunjukkan fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai lebih dari 100% yang menandakan pemerintah telah mampu memperoleh pendapatan yang melebihi target. Namun, pada tahun-tahun lainnya, rasio tersebut kurang dari 100%, yang menunjukkan bahwa tujuan keterlibatan yang optimal belum tercapai.

Secara umum kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo cukup baik dari segi ekonomis dan efisiensi, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Furqon, Iskandar Sam, W. T. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pendekatan Value For Money Tahun Anggaran 2017-2021. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 1(4), 551–562.
<https://jurnal.institutsunandoe.ac.id/index.php/ESE>
- Amril. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Metode Value for Money. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 1(196), 196–209.
- Dara Nadeya Dinanty, Nur Ainiyah, Hartono Hartono, & Nurdiana Fitri Isnaini. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 173–183.
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.874>
- Handy Eko Saputra, Goso, J. jasman. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Pt. Asuransi Sinar Mas Cabang Palopo*.
- Khikmah, A. (2015). *Pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money*. 6.
- Khoiriawati, N., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Desa, P., & Money, V. F. (2022). *Pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan analisis value for money*. 4, 38–54. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4132>
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuaangan pemerintah daerah kota surabaya tahun anggaran 2015-2019. *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- mekari jurnal. (22 C.E.). Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya. *Jurnal.Id*. <https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/>
- Nugraheni, N. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Novita Nugraheni1*, Yudhi*

Prasetyo², Shufia Zuhroh³, Etik Ipda Riyani⁴ Universitas Terbuka. 163–176.

Rezkia, R., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Buhuts*, 19(1), 238–254.

Rizeki, D. N. (2023). Value for Money adalah: Definisi, Konsep, dan Manfaat. *Majoo*.
<https://majoo.id/solusi/detail/value-for-money-adalah>

Sanger, G. W., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1193–1202.

Sulisworo, D. (2020). Pengukuran Kerja. *Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan*, 78.

Taufik, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 201–218. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.982>

Vinsensius Agus Rakadewa. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.

Wahyuni¹, S. (n.d.). Analisis pengukuran kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan metode value for money (studi khusus di pemerintahan daerah kota padang tahun 2016- 2020). 1(2), 326–334.

Wilman Juniardi & Pamela Natasa, S. P. (2022). Pengertian Statistika Deskriptif Lengkap dengan jenis dan Contohnya. *Quipper Blog*.
<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/matematika/statistika-deskriptif/>